



Perluasan Bandara Arung Pallaka Bone Batal

Perluasan Bandara Arung Pallaka Bone Batal

MAKASSAR, TRIBUN - Pembebasan lahan Bandara Arung Palakka Bone, Sulawesi Selatan batal.

Pembangunan bandara di jalan Bandara, Desa Mappolo Ulaweng Kecamatan Awangpone tersebut batal lagi lantaran keputusan Pemkab Bone. Pemkab Bone batal ajukan pembebasan lahan ke pemerintah pusat, tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Budiono (BKAD) Bone Budiono saat dikonfirmasi via ponsel, Minggu (1/12/2024).

Budiono mengatakan, kucuran dana untuk perluasan bandara seharusnya dilakukan di 2024, namun batal dilakukan provinsi.

"Itu (perluasan bandara) tidak jadi, karena sumber dana dari BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak turun,"ujarnya.

Ia mengungkapkan, jika perluasan bandara dilakukan, hal tersebut tentunya dapat meningkatkan sarana transportasi ke Bone.

"Padahal hal tersebut bisa mendongkrak ekonomi daerah dengan penduduk terbesar di wilayah Timur

Sulsel ini," jelasnya.

Perluasan ini akan meningkatkan kapasitas bandara untuk menerima jenis pesawat yang lebih besar seperti Boeing.

Rencana perluasan bandara ini telah diajukan sejak awal tahun dengan rencana penganggaran sebesar Rp10 miliar melalui APBD Bone.

"Perluasan bandara sebelumnya akan ditingkatkan dari 1400 meter, menjadi 2500 meter," tegasnya.

Lebih lanjut, ditanya soal kepastian penganggaran kembali di 2025, Budiono belum mau sesumbar.

Sebelumnya, hingga akhir tahun ini, operasional Bandara Arung Palakka juga dilaporkan masih belum berjalan.

Dengan demikian tercatat hampir 11 bulan bandara Arung Palakka menganggur.

Pun belum ada kepastian terkait rencana operasional ini, baik dari Provinsi maupun Otoritas Bandara Arung Palakka sendiri.

"Jadi belum ada dek (operasionalnya)," ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Arung Palakka Bone Andi Indar Gunawan.(whd)



HANDOVER

BATAL LAGI - Pembebasan lahan Bandara Arung Palakka Bone, Sulawesi Selatan batal. Pembangunan bandara di jalan Bandara, Desa Mappolo Ulaweng Kecamatan Awangpone tersebut batal lagi lantaran keputusan Pemkab Bone. Pemkab Bone batal ajukan pembebasan lahan ke pemerintah pusat, tahun ini.